

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kas merupakan aset yang sangat penting bagi operasional perusahaan dan dibandingkan dengan aset lainnya, kas merupakan aset yang paling likuid karena uang tunai mudah untuk ditipu. Sistem pencatatan dan pengendalian yang baik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penipuan. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah pemisahan fungsi antara fungsi penyimpanan kas dan fungsi pencatatan kas. Pengendalian ini terdiri dari dua bagian yang dapat dilaksanakan, yaitu pengendalian internal penerimaan kas dan pengendalian internal pengeluaran kas.

Pengelolaan kas dapat dilakukan dengan memperhatikan, mengamati dan menganalisis arus kas perusahaan, dimana arus kas merupakan ukuran banyaknya uang tunai yang masuk dan keluar perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Arus kas ini menunjukkan betapa efektifnya pengelolaan kas. Apabila pengelolaan kas lebih baik dibandingkan dengan anggaran kas maka pengelolaan kas perusahaan dapat dikatakan cukup baik, namun apabila perusahaan tidak merealisasikan arus kas maka pengelolaan keuangan dikatakan kurang efektif (Mutmainnah : 2016).

Pengendalian internal adalah metode dimana manajer bisnis memantau dan mengendalikan perusahaan mereka. Pengendalian internal memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya guna melindungi kekayaan atau kekayaan perusahaan, serta dapat meningkatkan efisiensi seluruh anggota perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, laporan akuntansi (manajemen), anggaran dan standar audit internal, dll.

Tentunya setiap perusahaan mempunyai sistem pengendalian tersendiri yang memantau seluruh aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut misalnya, beberapa tindakan pengendalian atau pengendalian internal dapat diterapkan di perusahaan.

Perencanaan kas yang baik dapat membantu manajemen mengidentifikasi sumber arus kas masuk dan keluar yang terkoordinasi. Dalam mengevaluasi kinerja yang dicapai, sistem pengendalian internal dana juga berguna, yang biasanya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan.

Sistem pengendalian kas internal suatu perusahaan yang lemah dapat membahayakan keamanan aset perusahaan, informasi yang tidak dapat diandalkan dan efisiensi operasional perusahaan mungkin tidak berjalan, yang dapat mengakibatkan penipuan kas. Namun penerapan pengendalian internal kas tersebut selalu ceroboh sehingga memungkinkan beberapa pihak menemukan celah dalam sistem yang ada dan melakukan penipuan. Pengendalian internal tidak hanya memeriksa kebenaran angka dan sumber keuangan perusahaan dari sudut pandang akuntansi, tetapi juga memperhatikan struktur organisasi perusahaan, efisiensi kerja dan keberhasilan kebijakan manajemen. Oleh karena itu pengendalian internal harus dipantau dan dievaluasi agar manfaat pengendalian internal berhasil dan dapat diperhatikan.

Penerapan pengendalian internal perusahaan dapat berhasil jika pengendalian tidak menjadi beban yang dapat memperlambat pencapaian tujuan perusahaan, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pengendalian internal bersifat komprehensif dan meluas ke seluruh bagian organisasi atau perusahaan.

Menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), penyelenggara sistem jaminan sosial nasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu badan hukum yang didirikan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dalam Pasal 5 ayat (2) UU BPJS, BPJS dibagi menjadi dua bagian, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara asuransi kematian, hari tua, dan pensiun. Sedangkan BPJS Kesehatan merupakan badan yang menyelenggarakan jaminan sosial pada program kesehatan. BPJS Kesehatan bukanlah lembaga keuangan yang menyalurkan uang kepada pihak ketiga, namun badan hukum ini hanya mengatur

dan mengumpulkan pembayaran yang kemudian digunakan untuk menunjang peserta yang sakit.

Sesuai ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan berkewajiban menyampaikan laporan keuangan enam bulan sekali lalu menyampaikan pada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Terdapat beberapa permasalahan pada pelaksanaannya yang sering terjadi seperti kekacauan di dalam konteks manajemen Negara terhadap BPJS yang berpotensi menghambat pelayanan kesehatan. Anggaran yang dialokasikan pada anggaran Kementerian Kesehatan dapat membuat pertanggung jawaban keuangannya menjadi tidak utuh dan seringkali mendapat tuduhan salah satu penyebab anggaran tersebut menjadi defisit.

Pada tahun 2019 kondisi keuangan BPJS Kesehatan pernah mengalami defisit anggaran sehingga imbasnya berakibat pada keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit (InfoPublik: 2019) dan pada tahun 2021 telah mencatatkan surplus (Liputan6 : 2022), apakah perkembangan keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan ini berhubungan dengan sistem pencatatan dan pengendalian terhadap pengelolaan kas yang diterapkan.

Berdasarkan kondisi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu kantor cabang BPJS Kesehatan yaitu Kantor Cabang Solok yang juga menerima akibat dari defisit anggaran dan keterlambatan pembayaran klaim di seluruh rumah sakit di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok yaitu dengan tema penelitian: “Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Kas BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok”

Penulis menilai bahwa sistem pengendalian internal yang baik merupakan hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan, mengingat terwujudnya visi dari sebuah perusahaan sangat bergantung pada baiknya sistem pengendalian internal yang diterapkan sebuah perusahaan, dan juga penting untuk proses bangkitnya sebuah organisasi jika sedang mengalami penurunan performa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang berkenaan dengan topik yang diteliti adalah Bagaimana efektivitas SPI pada pengelolaan Kas BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pada sistem pengendalian internal pengelolaan Kas BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penulis tentang sistem pengendalian internal perusahaan terhadap pengelolaan kas dan bagaimana membandingkan teori dengan praktik perusahaan dan praktik implementasinya.
- b. Bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai informasi pengelolaan kas yang baik melalui sistem pengendalian internal.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi acuan dan pembelajaran yang mungkin diperlukan dalam penelitian selanjutnya khususnya untuk pengendalian internal pengelolaan kas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini terbagi dalam enam bab, yang pertama adalah BAB I, yaitu Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sebagainya. Sistem penelitian, yang kedua BAB II yaitu tinjauan pustaka, yang berisi tentang landasan teori penelitian yang digunakan peneliti, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka penelitian, yang ketiga adalah BAB III Metodologi Penelitian yang memuat tentang metode-metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, termasuk penelitian topik, desain dan model penelitian,

teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data, yang keempat BAB IV Gambaran umum objek penelitian yang menjelaskan topik penelitian secara umum seperti Visi dan Misi Organisasi BPJS Kesehatan, BAB Kelima V Pembahasan yang meliputi uraian data yang diperoleh, analisis data dan pembahasan permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil pengolahan data, yang terakhir adalah BAB VI Kesimpulan yang memaparkan kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya, peneliti dan pemangku kepentingan.

